

**STUDI PERBANDINGAN SISTEM KREDIT TERNAK DOMBA DAN KERBAU  
DI KABUPATEN SUMEDANG DAN TASIKMALAYA**

Maman Paturochman\*  
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran

**ABSTRAK.** Penelitian mengenai Studi Perbandingan Sistem Kredit Ternak Domba Dan Kerbau Dari Pemerintah telah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya. Obyek yang diteliti terdiri dari 150 orang peternak domba dan 8 orang peternak kerbau yang menerima ternak gaduhan dari pemerintah propinsi Jawa Barat yang bersumber dari dana APBN dan APBD. Metode penelitian yang digunakan untuk menghimpun data empirik di lapangan adalah studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan merumuskan alternatif sistim kredit gaduhan yang diinginkan peternak dilihat dari jumlah ternak dan waktu pengembalian. Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari hasil analisis dan pembahasan adalah: 1. Ternak kerbau milik pemerintah yang disebarakan melalui program bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD, menunjukkan perkembangan populasi yang jelek, sedangkan ternak domba cukup baik.

2. Alternatif kredit gaduhan ternak domba dan kerbau yang sesuai dengan keinginan peternak adalah sebagai berikut: (a). Secara natura, paket kredit domba diberikan sebanyak 11 ekor dengan kontrak waktu selama 5 tahun dan ternak kerbau 3 ekor selama 6 tahun. (b). Berdasarkan perhitungan biaya yang diinvestasikan, keuntungan yang diperoleh dibagi ke dalam empat bagian, yaitu peternak 60 %; pemerintah 30 %; dana kematian 5 % dan dana operasional 5 %.

Kata kunci: Studi Perbandingan, Sistem Kredit, Domba dan Kerbau, Tasikmalaya dan Sumedang

**ABSTRACT.** The comparative study of the sheep and buffalo credit system has been conducted in the Sumedang and the Tasikmlaya Regency. The primary data has been collected from 150 sheep and 8 buffalo farmers. The method used in this study is case study. This study aimed to evaluate and formulate credit system that farmer wanted with timely and animal unit grounded. The conclutions of thir study are: 1. The reproduction and buffalo population development with excisting system is in bed condition, but sheep is in good enough. 2. The credit alternative that sheep and buffalo farmer wanted are: (a). In natural credit, the amount of animal has to distributed to farmers are 11 heads with 5 years gestation period for sheep and 3 heads of buffalos with 6 years gestation period. (b). In cost calculation that invested, the profit that occurs has to distributed to 4 share, that are: 60 % for farmer; 30 % for government; 5 % for mortality cost and 5 % for operational cost.

Key words: Comparataive study, sheep and buffalo, credit system, Tasikmalaya and Sumedang.

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan peternakan di Jawa Barat adalah melalui program penyebaran dan pengembangan ternak kepada para peternak dengan sistim pola gaduhan. Melalui kebijakan ini, populasi dan produksi hasil ternak diharapkan dapat meningkat dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan peternak dan masyarakat pedesaan umumnya. Penyebaran dan pengembangan ternak oleh pemerintah Jawa Barat sudah dilaksanakan sejak Pelita Pertama, baik untuk ternak besar, ternak kecil dan unggas. Kegiatan penyebaran ternak merupakan kegiatan yang saling terkait dan terus menerus. Hasil keturunan ternak gaduhan disebarkan kembali kepada peternak, sehingga jumlah peternak pengaduh secara konseptual akan terus bertambah.

Sebagai asset usaha, ternak memiliki karakteristik yang bersifat dinamis, karena eksistensinya merupakan respon terhadap lingkungan yang selalu berubah, mampu berkembang biak dan memiliki daya hidup yang beragam untuk setiap jenis ternak. Dengan demikian, secara alamiah ternak tersebut akan mengalami perubahan dalam struktur populasinya. Disamping factor biologis, perubahan populasi ternak di suatu daerah dipengaruhi oleh perpindahan ternak dari satu tempat ke tempat lainnya, akibat perilaku peternak dan kondisi social ekonomi yang mendesak peternak dalam mengambil keputusan usaha.

Intisari dari paparan pada latar belakang dapat dirumuskan dan diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauhmana perkembangan dan populasi ternak domba dan kerbau di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya.
2. Bagaimana penilaian peternak terhadap sistem kredit ternak yang sedang dilaksanakan.
3. Apakah ada alternative system penyebaran dan pengembangan ternak yang diinginkan peternak.

Tujuan dilaksanakannya kajian evaluasi kondisi ternak gaduhan adalah untuk mendapat gambaran keadaan ternak domba dan kerbau yang telah disebarkan.

1. Membandingkan perkembangan dan populasi ternak domba dan kerbau di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya.
2. Merumuskan penilaian peternak terhadap system kredit ternak yang sedang dilaksanakan.
3. Mengkaji system kredit ternak untuk memberikan alternative metode penyebaran dan pengembangan yang terbaik bagi peternak maupun pemerintah.

## Terminologi

Beberapa pengertian di dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah (SK Direktorat Jenderal Peternakan No. 50/HK.050/KPST/2/93 Tahun 1993), yang dimaksud dengan system gaduhan

**Studi Perbandingan Sistem Kredit Ternak Domba dan Kerbau di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya (Maman Paturochman)**

adalah system penyebaran ternak dari pemerintah kepada peternak dan dalam kurun waktu tertentu, maka peternak harus mengembalikan ternak pengganti hasil keturunan dari ternak yang pernah diberikan kepadanya. Penggaduh adalah peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan. Ternak pokok adalah ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangkan. Ternak setoran adalah ternak keturunan hasil pengembangan ternak dari pemerintah yang diserahkan oleh penggaduh sebagai kewajiban pengembalian gaduhan.

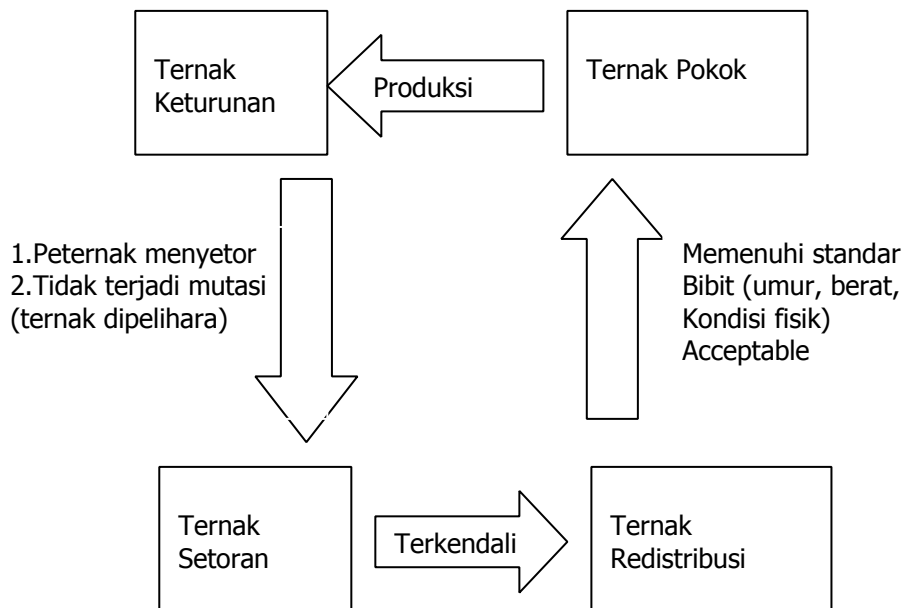
Berdasarkan pengertian kredit menurut FAO (1981), tujuan system gaduhan ternak pada dasarnya identik dengan kredit produksi, keduanya dibangun atas kesepakatan kedua belah pihak antara peminjam (penggaduh) dengan pemilik modal. Penggaduh memperoleh kewenangan untuk menggunakan asset pada saat sekarang dengan perjanjian kelak pada saat tertentu akan dikembalikan. Ketentuan penggaduhan ternak milik pemerintah dapat diamati pada Tabel 1. berikut ini.

Banyaknya ternak yang harus disetorkan dan berapa lama jangka waktu pengembaliannya, tergantung kepada jenis ternak gaduhannya. Mengacu kepada ketentuan jangka waktu pengembalian, maka tidak semua ternak keturunan adalah ternak setoran. Klaim atas ternak setoran berlaku, jika peternak memiliki kewajiban mengemba- liken ternak setoran.

Tabel 1. Kewajiban Setoran Ternak Untuk Setiap Paket Ternak Gaduhan

Jenis Ternak	Jumlah Ternak	Jangka Waktu Pengembalian	Kewajiban Setor	Standar Umur Bibit
Kerbau	1 ekor betina	8 tahun	2 ekor	18 - 24 bulan
	sepasang	9 tahun	3 ekor	
Domba/Kambing	1 ekor betina	2 tahun	2 ekor	8 - 12 bulan
	1 ekor jantan	2 tahun	1 ekor	

Secara konseptual perkembangan ternak gaduhan merupakan proses yang berlangsung terus menerus (never ending), populasinya akan terus meningkat apabila didukung oleh asumsi-asumsi sebagaimana digambarkan pada Ilustrasi 1. berikut.

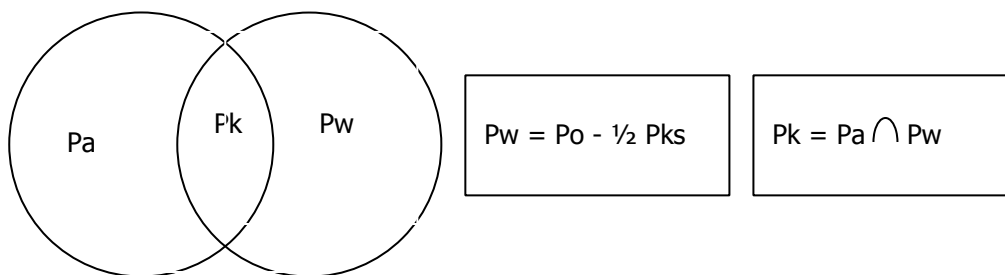


Ilustrasi 1. Proses Peralihan Status Ternak dalam Sistem Penyebaran dan Pengembangan Ternak Gaduhan.

Ternak keturunan akan beralih status menjadi ternak setoran, jika proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Tidak terpenuhinya asumsi di atas secara bertahap akan menghambat proses redistribusi dan pada akhirnya populasi akan menurun.

#### Populasi Ternak Pokok

Yang dimaksud populasi di sini dibatasi oleh frame unit pengamatan, yaitu rumah tangga peternak pengaduh yang ternaknya berupa bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Tingkat I Jawa Barat. Untuk mengetahui populasi ternak pokok, dapat dilakukan melalui pendekatan konsep himpunan sebagai berikut.



$P_a$  = populasi ternak pokok hasil pengamatan.  
 $P_k$  = populasi ternak yang telah dikoreksi.  
 $P_w$  = populasi ternak pokok yang belum lunas.  
 $P_w = P_o - \frac{1}{2} P_{ks}$ .  
 $P_o$  = populasi ternak pokok yang diterima peternak.  
 $P_{ks}$  = populasi ternak keturunan yang disetor peternak

Ilustrasi 2. Terminologi Populasi Ternak Pemerintah dengan Pendekatan Konsep Himpunan

**Populasi Ternak Siap Redistribusi**

Ternak yang siap redistribusi merupakan ternak keturunan ternak pokok yang pada saat pencacahan masih dipelihara oleh peternak penggaduh dan peternak wajib mengembalikan setoran. Besarnya jumlah ternak yang siap redistribusi ( $P_r$ ) merupakan intersection dari dua populasi.

$$P_r = P_a \cap P_s$$

$P_a$  = Populasi ternak keturunan yang ada  
 $P_s$  = Populasi ternak keturunan yang harus disetor  
 $P_r$  = Populasi ternak keturunan yang siap redistribusi

Penentuan ternak keturunan yang siap didistribusikan didasarkan pada catatan kewajiban peternak untuk menyerahkan ternak setoran. Populasi siap redistribusi dapat disebarkan jika memenuhi asumsi bahwa setelah dilakukan pencacahan: 1) tidak terjadi mutasi ternak keturunan yang telah dicatat tersebut.

#### Perkembangan Populasi Ternak Pemerintah

Perkembangan ternak pemerintah didasarkan kepada perhitungan populasi ternak yang dicatat selama survey. Ukuran pertama adalah kumulatif jumlah ternak pokok yang disebarakan selama periode 1990 sampai 1999 ( $P_0$ ). Ukuran kedua adalah jumlah ternak pokok termasuk keturunannya yang masih dipelihara peternak ( $P_1$ ).

Perhitungan di atas didasarkan kepada dua pertimbangan berikut, yaitu: Pertama, salah satu tujuan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah bertujuan meningkatkan populasi. Kedua, jika populasi hanya didasarkan kepada populasi ternak pokok tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Adapun kriteria bahwa populasi ternak berkembang didasarkan kepada nilai  $P_1$  yang lebih besar dari pada  $P_0$ .

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk mengungkap data yang diperlukan adalah studi kasus. Penggunaan metode studi kasus sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu inventarisasi dan perkembangan ternak domba dan kerbau kredit. Dengan demikian, maka seluruh peternak domba dan kerbau pengaduh diteliti. Secara garis besar penetapan responden meliputi tiga tahap, yaitu: Tahap pertama, mengkaji daftar peternak dari Dinas Peternakan Propinsi DT I Jawa Barat yang diperoleh dari laporan Dinas Peternakan Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya. Tahap kedua, mengkonfirmasi data dari Propinsi dengan Seksi penyebaran dan Pengembangan Ternak di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya serta mencari data pelengkap yang berupa alamat domisili setiap peternak pengaduh. Tahap ketiga, observasi lapangan untuk masing-masing kabupaten, yang didampingi oleh Kepala Cabang Dinas Kecamatan, ketua kelompok peternak dan aparat dari pedesaan.

Teknik pengambilan data primer yang diperlukan, dilakukan melalui sensus langsung kepada peternak penerima ternak gaduhan. Data sekunder diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten dan Kepala Cabang Dinas Kecamatan serta instansi terkait lainnya di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya.

Sensus ternak gaduhan dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya yang menerima bantuan ternak yang bersumber dari APBN dan APBD Tingkat I Jawa Barat. Adapun waktu yang diperlukan untuk menghimpun data lapangan selama dua bulan.

Yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah 150 orang peternak yang menerima ternak domba dan 8 orang peternak yang menerima ternak kerbau gaduhan. Peternak memperoleh ternak gaduhan dari pemerintah melalui Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat yang bersumber dari dana APBN dan APBD Tingkat I Jawa Barat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Populasi Ternak**

Populasi ternak kerbau dan domba gaduhan milik pemerintah dan masyarakat dari waktu ke waktu harus meningkat, jika program gaduhan ini berjalan dengan lancar. Hal ini bertitik tolak dari suatu kegiatan yang diberi ungkapan sebagai suatu proses yang terus menerus tanpa berhenti (never ending process). Secara empirik keberhasilan sistem pengembangan populasi ternak seperti ini diperlihatkan dalam pengembangan populasi ternak sapi potong di Pulau Sumba yang diberi nama "Sumba Kontrak".

#### *Populasi Ternak Kerbau.*

Berdasarkan hasil sensus, populasi ternak kerbau pokok di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya yang bersumber dari dana APBD ada 8 ekor. Penyebaran ternak kerbau ini sudah relatif lama dibanding dengan ternak lainnya, tetapi pada saat ini ada yang masih berstatus milik pemerintah tinggal 3 ekor dan 5 ekor lagi sudah menjadi milik peternak. Populasi ternak kerbau keturunan tercatat ada 5 ekor yang dipelihara oleh 4 orang peternak. Secara keseluruhan, ternak kerbau pokok dan keturunannya yang ada sekarang ini berjumlah 13 ekor.

Ternak kerbau milik pemerintah yang disebarakan melalui program bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD, tidak menunjukkan perkembangan populasi yang sesuai dengan harapan. Peternak tidak berhasil mengembangkan ternak kerbau bantuan pemerintah, sehingga tidak berpengaruh pada penambahan populasi.

Dibandingkan dengan jumlah ternak kerbau yang disebarakan, populasi ternak kerbau yang ada sekarang ini sangat jauh menurun, karena jumlah ternak yang disebarakan sebanyak 55 ekor, tetapi yang ada sekarang hanya 13 ekor. Dengan demikian, maka perkembangan populasi ternak kerbau ini negative dan penurunannya sangat besar, yaitu 42 ekor atau sebesar 76 %.

#### *Populasi Ternak Domba*

Populasi ternak domba pokok hasil sensus di Kabupaten Sumedang dan Tasikmalaya berjumlah 420 ekor, yang terdiri dari 299 ekor ternak domba pokok awal dan 121 ekor ternak domba pokok keturunan. Populasi ternak domba keturunan dari sumber dana APBN dan APBD ada 279 ekor, yang terdiri dari 156 ekor anak domba dan 123 ekor domba siap sebar.

Ternak domba milik pemerintah yang disebarakan melalui program bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD menunjukkan hal yang sama dengan ternak kerbau, yaitu terjadi penurunan populasi. Dilihat dari sisi peternak, berarti mereka juga sama dengan peternak kerbau, yaitu tidak mampu mengembangkan ternak bantuan dari pemerintah.

Perbandingan antara ternak domba yang disebarakan melalui program bantuan pemerintah dengan populasi yang ada, terjadi penurunan sebesar 577

ekor atau 53 %. Angka ini diperoleh dari banyaknya ternak domba pokok yang disebarakan 897 ekor dan ternak domba pokok yang sekarang masih ada dipelihara peternak 420 ekor. Dengan demikian, maka jumlah populasi ternak domba pokok milik pemerintah yang disebarakan kepada peternak mengalami penurunan populasi.

### **Penilaian Peternak Terhadap Pola Gaduhan**

Untuk memperoleh masukan tentang pelaksanaan sistim gaduhan ternak ini dievaluasi pula penilaian peternak, karena merekalah yang dapat menilai lancar-tidaknya dan baik-buruknya aplikasi sistim ini di masyarakat. Hasil pengamatan yang diperoleh dari para penggaduh ternak kerbau dan domba adalah sebagai berikut.

#### *Kualitas Bibit*

Prioritas utama perbaikan system gaduhan adalah perbaikan kualitas ternak pokok yang sesuai dengan standar bibit yang layak. Sebagian besar peternak mengeluh bahwa ternak yang mereka terima belum dewasa kelamin sehingga perlu waktu yang lama untuk beranak. Masalah lain yang timbul adalah tingginya tingkat kematian ternak dan ternak betina yang majir.

#### *Pengembalian Ternak*

Pengembalian ternak domba dan kerbau sebanyak dua ekor dari satu ekor bibit yang mereka terima dinilai terlalu berat. Mereka menginginkan pengembalian itu hanya satu ekor untuk setiap ekor bantuan ternak yang mereka terima. Penilaian ini muncul, karena ada bantuan ternak dari instansi lain seperti dinas sosial yang bersifat hibah atau persyaratan yang lebih ringan.

#### *Penggantian Jenis Ternak Gaduhan*

Peternak yang menerima ternak gaduhan kerbau menilai bahwa mereka tidak dapat merasakan keberhasilan yang cepat seperti halnya peternak domba, karena kemampuan reproduksi kerbau lambat. Untuk periode penggaduhan yang akan datang, mereka mengusulkan untuk mengganti kerbau dengan domba. Dilihat dari sisi lain sebenarnya peternak kerbau itu memperoleh pendapatan yang tidak diterima peternak domba, jika ia menyewakan kerbaunya untuk membajak sawah.

#### *Intensitas Dan Kualitas Pembinaan*

Peternak umumnya memerlukan pembinaan yang intensif, sehingga jika ada permasalahan yang dihadapi dapat segera diatasi. Selain itu, melalui pembinaan tersebut memberi kesan adanya kesungguhan petugas untuk mengembangkan ternak pemerintah dan secara psikis memotivasi peternak untuk memelihara ternak lebih baik. Sikap petugas dalam melaksanakan peraturan sistim gaduhan menjadi salah satu kunci keberhasilan program bantuan pemerintah.

#### *Jumlah Paket Bantuan Ternak*

Jumlah satuan paket ternak gaduhan domba disarankan untuk diperbesar, karena pendapatan yang diperoleh dari satu ekor induk sangat kecil, apalagi jika bibitnya kurang baik. Perlu dikaji lebih jauh, apakah dengan memperbesar paket gaduhan kinerjanya menjadi lebih baik. Jika pola gaduhan dipertahankan, perlu perbaikan pelaksanaannya dengan memperhatikan saran peternak.

#### **Alternatif Perbaikan Sistem Gaduhan Ternak Pemerintah.**

Pengembalian ternak yang diterapkan dalam sistim gaduhan ternak pemerintah adalah pola Sumba Kontrak. Pada pola ini peternak yang menerima bantuan ternak wajib menyetorkan ternak keturunan dalam dalam kurun waktu dan jumlah tertentu, sedangkan ternak pokok akan menjadi milik peternak. Pengembalian ternak yang diterima pemerintah disebarkan kembali kepada peternak lain yang belum menerima bantuan. Jika dapat berjalan dengan lancar, pola pengembangan ternak seperti ini sangat ideal, karena merupakan proses pengembangan yang terus menerus.

Alternatif perbaikan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pengembangan peternakan dapat ditempuh melalui tindakan sebagai berikut:

#### *Paket Bibit Ternak Dan Pengawasan*

Salah satu tujuan dari pengembangan peternakan adalah untuk meningkatkan pendapatan peternak ke tingkat yang lebih baik. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka besarnya paket pemberian bantuan ternak harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing peternak.

Bibit ternak yang digaduhkan kepada peternak harus dipilih dengan baik atau jika memungkinkan diberikan dalam bentuk uang tunai sehingga peternak dapat memilih ternak yang baik sesuai dengan keinginan mereka dan pelaksanaannya diawasi oleh petugas pemerintah.

Sistim monitoring yang kontinyu diperlukan untuk pengamanan asset ternak dan menjaga kelangsungan usaha. Selain itu, agar pencatatan yang dilakukan dapat berfungsi dengan baik harus didukung oleh pengawasan yang efektif oleh ketua kelompok.

#### *Pembinaan Sistem Gaduhan*

Jangka waktu pengembalian ternak gaduhan harus dipertimbangkan kembali disesuaikan dengan kondisi usaha ternak dengan memperhatikan biaya dan penerimaan usaha, sehingga peternak tidak merasa dirugikan. Untuk pola bagi hasil perlu pembatasan waktu yang tegas untuk mempermudah perhitungan pendapatan dan pertanggungjawaban proyek. Pola bagi hasil harus didasarkan pada perbandingan beban biaya dan modal yang diinvestasikan masing-masing. Hasil produksi dapat dikembalikan kepada pemerintah dalam bentuk uang atau ternak.

Peternak sebaiknya terkonsentrasi dalam suatu kawasan dan terhimpun dalam suatu kelompok. Ketua kelompok bertanggungjawab terhadap tugas pencatatan dan pengumpulan dana pengembalian dari anggota. Biaya operasional dan insentif bagi kelompok disisihkan dari bagian hasil yang diterima peternak dan pemerintah.

*Alternatif Penerapan Pola Bagi Hasil*

Penyebaran ternak pemerintah dengan menggunakan pola bagi hasil harus memperhatikan batas waktu lamanya pemeliharaan yang didasarkan pada umur produktif ternak bibit. Adapun berbagai kriteria yang harus dijadikan standar dalam pola bagi hasil ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Lamanya Pemeliharaan Ternak Pemerintah Pada Sistem Bagi Hasil

Jenis Ternak	Sistim Pemeliharaan Pembibitan
Kerbau	6 tahun
Domba	5 tahun

Setelah waktu kontrak selesai, maka nilai ternak pokok menjadi milik bersama antara peternak dan pemerintah dengan bagian masing-masing sebesar 50 % dan banyaknya ternak yang harus diserahkan peternak kepada pemerintah sesuai dengan perjanjian. Ternak bagian pemerintah pada kesempatan berikutnya digulirkan lagi kepada peternak lain yang belum mendapat kesempatan.

Alternatif lain adalah system bagi hasil ini tidak berdasarkan secara natura, tetapi berdasarkan pertimbangan proporsi biaya yang dikeluarkan masing-masing pihak. Adapun pola bagi hasil tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Alternatif Pola Bagi Hasil Berdasarkan Proporsi Biaya

No.	Jenis Ternak	Lama Gaduhan (tahun)	Pembagian Hasil (%)	Skala Usaha (ekor)
1.	Kerbau	6	60:30:5:5	3
2.	Domba	5	60:30:5:5	11

Keterangan: Proporsi bagi hasil peternak 60 %; pemerintah 30 %; kematian 5 % dan operasional kelompok 5 %.

Penentuan skala usaha dihitung berdasarkan estimasi pendapatan peternak untuk memenuhi tingkat upah minimum regional (UMR). Bagi peternak yang

telah memiliki ternak sendiri, adanya bantuan ternak gaduhan bersifat tambahan sehingga kepemilikan ternaknya meningkat mencapai jumlah skala minimum.

Pola bagi hasil seperti pada tabel di atas, pembagiannya harus berdasarkan nilai uang dari ternak yang akan dibagikan. Agar penilaiannya dapat dirasakan secara adil, maka peternak pengaduh dan petugas pemerintah harus bersepakat menentukan harga yang layak sehingga peternak tidak merasa dirugikan. Dana kematian yang besarnya 5 % dikelola oleh petugas Dinas Peternakan untuk asuransi kematian ternak yang digaduhkan dan dana 5 % lainnya dikelola oleh ketua kelompok untuk kegiatan operasional.

## **KESIMPULAN**

Hasil analisis, interpretasi dan pembahasan dari data yang terkumpul memberi arah pada perumusan kesimpulan sebagai berikut.

1. Ternak kerbau milik pemerintah yang disebarakan melalui program bantuan yang bersumber dari dana APBN dan APBD, menunjukkan perkembangan populasi yang jelek, tetapi ternak domba cukup baik.
2. Penilaian peternak terhadap pelaksanaan kredit gaduhan ternak domba dan kerbau adalah sebagai berikut:
  - a. Bibit yang diberikan kualitasnya jelek dan tingkat kematian tinggi.
  - b. Kredit tidak diberikan dalam bentuk ternak, tetapi berupa uang sehingga peternak dapat memilih dan membeli ternak sendiri yang diawasi oleh petugas pemerintah.
  - c. Pengembalian bibit sebanyak 2 ekor dari 1 ekor yang diterima sangat memberatkan.
  - d. Peternak pengaduh kerbau ingin menggantinya dengan domba, karena hasilnya tidak dapat dirasakan secepat pengaduh domba.
3. Alternatif kredit gaduhan ternak domba dan kerbau yang sesuai dengan keinginan peternak adalah sebagai berikut:
  - a. Secara natura, paket kredit domba diberikan sebanyak 11 ekor dengan kontrak waktu selama 5 tahun dan ternak kerbau 3 ekor selama 6 tahun.
  - b. Berdasarkan biaya, keuntungan yang diperoleh dibagi ke dalam empat bagian, yaitu peternak 60 %; pemerintah 30 %; dana kematian 5 % dan dana operasional 5 %.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Pertanian. 1993. Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan No. 50/HK.050/Kpts/2/93. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 1993. Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.146/Kpts/HK.050/2/93. Jakarta.

FAO. 1965. Farm Management Manual. FAO Regional Office for Asia and The Far East. Bangkok.

Gatenby, R. M. 1986. Sheep Production in The Tropics and Sub Tropics. First Published in The United State of America by Longman Inc. New York.

Haryanto, B.R. Rangkuti, Y.T. Raharja dan H. Budiman.1999. Budidaya, Pasca Oanen dan Analisis Usaha Ternak Domba. Kerja Sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknomlogi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.

Hasan Hadiana. 1996. Kajian Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pola Gaduhan Ternak Pemerintah. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Dinas Peternakan Propinsi DT I Jawa Barat. Bandung.

Kay, R.D. 1981. Farm Management: Planning, Control and Implementation. McGraw Hill International Book Company.

Kedi Suradisastra. 1983. Attitudinal Correlates and Variation among Traditional Sheep Farmers. The Case of Village Sangiang. Talaga Majalengka. Prosiding Pertemuan Ilmiah Penelitian Ruminansia Kecil. Sr.CRSP. Balai Penelitian Ternak Bogor.

Lasley, J.B. 1978. Genetics of Livestock Improvement. 3 rd Edition. Department of Animal Husbandry University of Missouri. Prentice Hall. Inc. Englewood.

Mason, I.L. 1980. Prolific Tropical Sheep. FAO Animal Production and Health Paper. FAO of The United Nation. Rome.

Mawi, S. Prifil Sistem Penggaduhan Ternak Domba dan Kambing di Jawa Barat. Proceeding Pertemuan Ilmia Ruminansia. Jilid 2: Ruminansia Kecil. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Departemen Pertanian. Bogor.

Penny, D.H. 1969. Indonesia Dalam Agricultural Development in Asia. Editor: R.T. Shand. Australian National University Press. Canberra.

Robinson, D.W. 1977. Livestock in Indonesia. Research Report. No. 1. Centre for Animal Research and Development. Bogor.

Simatupang, P.; Jamal, E. Togatorop, M.H. 1993. Analisis Ekonomi Perbandingan Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Potong Pola PIR dengan Pola Gaduhan Tradisional di Propinsi Bali. Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Vol.XII. No. 3 . Jakarta.